

LAPORAN PENELITIAN



PERAN LEMBAGA KEUANGAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT

oleh :
Dra, Hj, Anurlis Abbas MA.

Sri Maryati, SE, MSi

Drs, M. Nazer, MA

Drs, Amra Ausri

**No Kontrak: No 87/DL-SK/UNAND/VIII-2003
HIBAH PENELITIAN
PROGRAM DUE-LIKE 2003/2004**

**JURUSAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2003**

**Prof. Dr. Nurdin, MS
NIP. 130 344 863**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian:

PERAN LEMBAGA KEUANGAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT

2. Ketua Pelaksana

Nama	: Dra. Hj. Anurlis Abbas, MA.
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 25 September 1943
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Dosen Fak Ekonomi Universitas Andalas Padang
Golongan/NIP	: IVa /130 349 636
Alamat	: Jl. Belanti Lolong Padang 25137. Telp. 0751 442148
Bidang Keahlian	: Ekonomi Moneter & Agri Bisnis

3. Anggota Pelaksana : a. Drs. M. Nazer, MA
b. Drs. Amra Ausri
c. Sri Maryati, SE, MSi
d. 3 orang mahasiswa

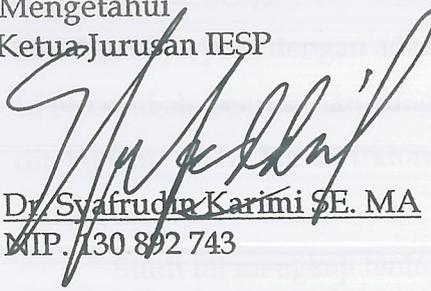
4. Jangka Waktu Kegiatan : 6 (Enam) Bulan

5. Biaya Kegiatan

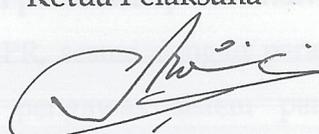
- a. Sumber Biaya : Dana DUE-LIKE Unand
b. Biaya : Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
c. No Kontrak : No 87/DL-SK/UNAND/VIII-2003

Padang, 3 Desember 2003

Mengetahui
Ketua Jurusan IESP


Dr. Syafrudin Karimi SE, MA
NIP. 130 892 743

Ketua Pelaksana


Dra. Hj. Anurlis Abbas, MA.
NIP. 130 349 636

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas


Prof. Dr. Sjafrizal, MA
NIP. 130 365 548

Mengetahui
Direktur LPIU-DUE-LIKE
Universitas Andalas

Prof. Dr. Nurdin, MS
NIP. 130 344 863

Peran Lembaga Keuangan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Sumatera Barat

Abstrak

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat di suatu daerah. Dari sudut pandang ilmu ekonomi faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi, sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi.

Modal merupakan faktor ekonomi yang paling sering dibahas dan dianggap sebagai faktor penentu dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena itu akumulasi modal dan mobilisasi dana merupakan aktivitas yang sangat penting dalam upaya pengembangan ekonomi suatu masyarakat. Lembaga yang terkait dengan aktivitas mobilisasi dana dan peyaluran dana dalam suatu perekonomian adalah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga kaeuangan bukan bank.

Masyarakat Sumatera Barat sudah sangat akrab dengan lembaga keuangan dalam aktivitas ekonominya, bahkan di daerah ini telah tumbuh dan berkembang suatu lembaga keuangan lokal yang disebut LPN (Lumbung Pitih Nagari). Dan dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dan ditambah pula dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988, maka LPN berubah bentuk dan fungsi menjadi BPR, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, selaku pengawas sistem perbankan di Indonesia.

Studi ini mengkaji tentang faktor penentu peran lembaga keuangan lokal di Sumatera Barat, dengan menggunakan pendekatan dari sisi permintaan dan penawaran dana, atau dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Dengan memilih 2 (dua) kabupaten sebagai daerah sampel penelitian, dimana dari masing-masing kabupaten dipilih 2 (dua) nagari sebagai lokasi pemilihan responden penelitian secara purposive random sampling, yang terdiri dari nasabah BPR dan anggota koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan lokal di daerah yang bersangkutan. Adapu jumlah responden adalah 40 (empat

puluh) orang untuk masing-masing nagari, dengan demikian total responden penelitian ini adalah 160 (seratus enam puluh orang).

Hasil studi memperlihatkan bahwa nasabah BPR mempunyai kualitas pendidikan dan ekonomi yang relatif lebih baik dari pada anggota koperasi simpan pinjam, dimana mayoritas nasabah BPR maupun anggota koperasi mempunyai pekerjaan utama dan tambahan sebagai pedagang.

Dari hasil estimasi ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghimpunan dana oleh lembaga keuangan lokal di Sumatera Barat adalah tingkat bunga yang rendah, keterampilan petugas dan fasilitas antar jemput. Dengan derajat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan peminjaman dana pada lembaga keuangan lokal adalah variabel tingkat bunga yang rendah dan fasilitas antar jemput.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, peran lembaga keuangan lokal di Sumatera Barat dalam pengembangan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat bunga, keterampilan petugas (kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola lembaga) dan kualitas pelayanan, khususnya fasilitas antar jemput.

Meskipun menurut masyarakat peran lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi masyarakat telah dapat dirasakan manfaatnya, namun pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan lokal tetap harus terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya tugas dan tanggung jawab lembaga keuangan lokal sebagai intermediasor keuangan di daerah untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dalam otonomi daerah dewasa ini. Dimana kemandirian dalam ekonomi sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang tengah dilakukan, jika kemandirian ini dapat dibangun dari level ekonomi terbawah, maka struktur ekonomi yang kuat akan dapat terbentuk dan menjadi modal yang kuat dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6. Daerah Penelitian	8
1.7. Data dan Sumber Data	8
1.8. Metode Analisa	8
1.9. Jadwal Penelitian	9
1.10. Tim Peneliti	9
1.11. Biaya Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA & METODE PENELITIAN	11
2.1. Tinjauan Teoritis	11
2.1.1. Tinjauan Teoritis Tentang Lembaga Keuangan	11
2.1.2. BPR & Koperasi Simpan Pinjam	11
2.1.3. Kegiatan Penghimpunan Dana	18
2.1.4. Faktor Penentu Tabungan	21
2.1.5. Kegiatan Penggunaan Dana	25
2.1.6. Konsep Penilaian Kredit	28
2.2. Survey Literatur	30
2.3. Hipotesa Penelitian	33

	2.4. Metode Penelitian	33
BAB III	GAMBARAN UMUM KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN LOKAL SUMATERA BARAT	40
	3.1. Kondisi Geografis Sumatera Barat	40
	3.2. Kondisi Demografis Sumatera Barat	41
	3.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat	41
	3.4. Struktur Ekonomi Sumatera Barat	45
	3.5. Perkembangan Lembaga Keuangan Lokal di Sumatera Barat	46
	3.5.1. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat	47
	3.5.2. Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat	50
BAB IV	PROFIL NASABAH LEMBAGA KEUANGAN LOKAL SUMATERA BARAT	53
	4.1. Umur dan Jenis Kelamin	53
	4.2. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	54
	4.3. Tingkat Pendapatan	56
	4.4. Tingkat Pendidikan	57
	4.5. Kegiatan Penyimpanan Dana	58
	4.6. Kegiatan Peminjaman Dana	62
BAB V	TEMUAN PENELITIAN	68
	5.1. Analisis Faktor Penentu Peran Lembaga Keuangan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Sumatera Barat	68
	5.1.1. Analisis Faktor Penentu Penyimpanan Dana	68
	5.1.2. Analisis Faktor Penentu Peminjaman Dana	70
	5.2. Implikasi Kebijakan	73
	5.3. Persepsi Pemuka Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Lokal	75
BAB VI	PENUTUP	76
	6.1. Kesimpulan	76
	6.2. Saran-Saran	77
	6.3. Keterbatasan Studi	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah telah berlangsung selama dua tahun lebih sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang nomor 25/1999 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak pemberlakuannya, kedua undang-undang ini telah menjadi topik hangat yang menjadi perhatian dan perbincangan banyak pihak, yang mewujud dalam bentuk kritik, saran dan ungkapan ketidakpuasan.

Tanpa mengabaikan berbagai perdebatan yang masih terus mengalir, tampaknya masih belum banyak pihak yang memahami bahwa otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan akan tetapi merupakan alat dan media untuk dapat mencapai cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan kebijakan otonomi daerah yang berorientasi dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Tim LIPI, 2002).

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dilihat sebagai *otonomi masyarakat daerah* dan bukan hanya sekedar *otonomi pemerintah daerah* dengan konsekuensi logis bahwa setiap paket kebijakan otonomi daerah harus berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selanjutnya otonomi daerah juga harus dilihat sebagai *hak daerah* yang sudah ada pada masyarakat setempat, konsekuensi logis dari cara pandang ini adalah otonomi daerah sebagai hak masyarakat setempat tidak dapat dicabut oleh pemerintah pusat.

Implementasi otonomi daerah sesuai dengan cara pandang di atas membutuhkan reorganisasi pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman potensi dan karakteristik daerah. Disamping itu juga dibutuhkan pelembagaan mekanisme bagi partisipasi rakyat dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

Untuk itu Pemda Sumatera Barat telah mencanangkan kebijakan “kembali ke nagari dan kembali ke surau” dengan memberlakukan Perda Nomor 9/2000 yang bertujuan untuk mengatur Nagari-Nagari yang ada di daerah kabupaten, di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dimana pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, sesuai dengan kondisi dan situasi di masing-masing daerah yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Perda Sumatera Barat No 9/2000 ini maka semua desa yang dibentuk berdasarkan UU No 5/1979 telah dilikuidasi dan digabungkan menjadi Nagari sesuai dengan situasi sebelum adanya desa. Dan hingga Januari 2003 sudah berdiri sebanyak 497 nagari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Nagari Menurut Kabupaten di Sumatera Barat, Tahun 2003

No	Kabupaten	Jumlah Nagari		
		Semula	Pemekaran	Sekarang
1	Solok	82	4	86
2	50 Kota	70	5	79
3	Tanah Datar	75	-	75
4	Sw. Lunto/Sjj	52	7	59
5	Agam	73	-	73
6	Pasaman	49	-	49
7	Pesisir Selatan	36	-	36
8	Padang Pariaman	52	-	52
Jumlah		489	16	497

Sumber: Biro Pemerintahan Nagari/Kelurahan Pemda Sumatera Barat, 2003.

Meskipun secara formal perda untuk nagari di wilayah perkotaan belum ada, namun kenyataan memperlihatkan bahwa di perkotaan Sumatera Barat juga ada nagari. Dengan demikian, masih ada kemungkinan bahwa jumlah nagari di Sumatera Barat akan bertambah.

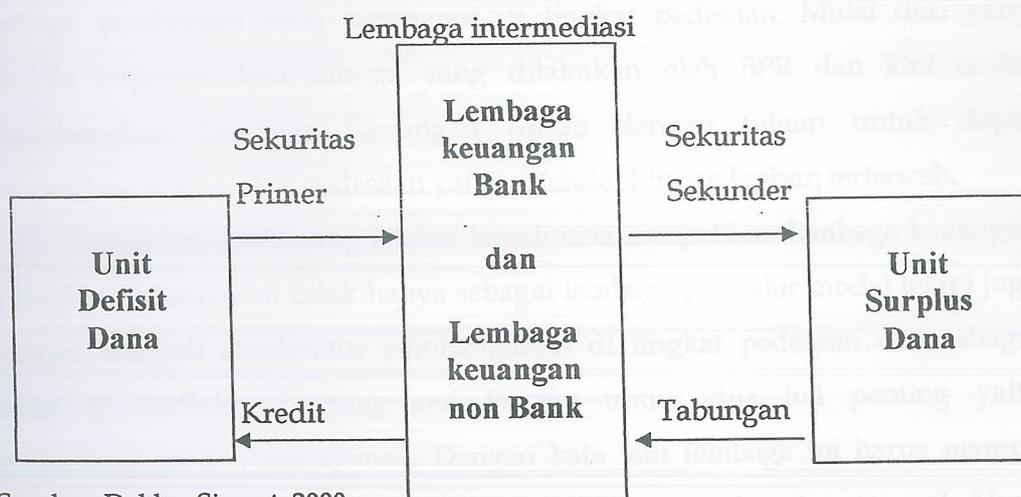
Perubahan sistem pemerintahan dari desa kembali ke nagari jelas akan membawa berbagai konsekuensi. Diantaranya adalah konsekuensi ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro. Salah satu konsekuensi dari sisi makro ekonomi adalah masalah pembiayaan pembangunan, dimana sampai saat ini untuk pemerintahan kota dan kabupaten masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang lebih dikenal dengan DAU (Dana Alokasi Umum),

masalah yang sama juga dihadapi oleh Nagari sebagai unit pemerintahan terendah saat ini di Sumatera Barat.

Sedangkan dari sisi ekonomi mikro konsekuensi penting yang dihadapi diantaranya adalah bagaimana menggerakkan kegiatan ekonomi anak nagari secara individu agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian nagari. Hal ini memiliki arti strategis dalam rangka upaya pengembangan ekonomi nagari yang tangguh dan berdaya saing, karena keterbukaan ekonomi dunia telah memaksa setiap daerah tak terkecuali nagari untuk mampu bersaing dengan daerah lain baik di Indonesia maupun manca negara.

Dalam mekanisme perekonomian moderen, salah satu pelaku ekonomi yang berfungsi sebagai bagian penting dari motor penggerak perekonomian adalah lembaga keuangan sebagai intermediasor keuangan dalam perekonomian. Proses intermediasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 : Proses Intermediasi Keuangan



Sumber: Dahlan Siamat, 2000.

Proses intermediasi keuangan dilakukan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit antara lain dapat berupa saham, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, dan lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder untuk unit surplus, misalnya giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

Akan tetapi sampai saat ini lembaga keuangan pada umumnya lebih menyukai untuk berkiprah di daerah perkotaan, namun pemusatan lembaga

keuangan ini di wilayah perkotaan adalah fakta ekonomi yang sangat rasional, karena kota merupakan kawasan yang lebih produktif dengan dukungan fasilitas dan kualitas manusia pengelola ekonomi yang lebih baik dibandingkan kawasan pedesaan. Sehingga kawasan perkotaan lebih menjanjikan keuntungan berusaha yang lebih besar pula.

Sebagaimana kawasan pedesaan pada umumnya, maka nagari di Sumatera Barat adalah kawasan yang identik dengan masyarakat pertanian tradisional, yang dekat dengan masalah keterbelakangan dan kemiskinan. Dimana keberadaan lembaga keuangan juga masih terbatas. Meskipun anak nagari di Sumatera Barat telah cukup lama mengenal adanya LPN (Lumbung Pith Nagari), dan kini telah banyak yang berubah menjadi BPR-LPN. Namun keberadaan lembaga ini belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi anak nagari.

Dan jika dilihat dari kebijakan sektor keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka sejak tahun 1980-an sudah cukup banyak bentuk lembaga pembiayaan yang beroperasi di tingkat pedesaan. Mulai dari yang dikelola koperasi desa hingga yang dilakukan oleh BPR dan kini mulai dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro dengan tujuan untuk dapat menjangkau masyarakat pedesaan yang potensial hingga lapisan terbawah.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana menjadikan lembaga keuangan di tingkat pedesaan ini tidak hanya sebagai lembaga penyalur modal tetapi juga mampu menjadi akselerator pembangunan di tingkat pedesaan dan sebagai *Center of Excellence, Learning and Practise* untuk dua hal penting yaitu kewirausahaan dan manajemen. Dengan kata lain lembaga ini harus mampu berperan ganda dalam perekonomian saat ini, yaitu sebagai penggerak bisnis dan penyelamat yang kritis.

Khusus untuk Nagari di wilayah Sumatera Barat, maka lembaga keuangan yang ada di tingkat nagari memiliki fungsi tambahan, di mana dalam menjalankan fungsi ekonominya lembaga ini diharapkan akan mampu mendorong ekonomi anak nagari dengan tetap berpegang pada nilai-nilai adat Minangkabau dan Islam sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang

ideal yakni mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan menjunjung tinggi nilai falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdirinya Nagari di daerah Sumatera Barat di satu sisi merupakan perwujudan implementasi otonomi daerah yang berorientasi serta berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah, namun di sisi lain merupakan tantangan bagi pemerintah lokal dan masyarakat yang bersangkutan, terutama menyangkut kesiapan sumber daya lokal, baik sumberdaya manusia, keuangan, kelembagaan dan sumberdaya daya pendukung lainnya.

Khusus untuk lembaga keuangan lokal, maka masalah yang hendak dikaji melalui studi adalah bagaimana kondisi dan kesiapan lembaga keuangan lokal di nagari dalam menggerakkan dan mendorong perekonomian anak nagari khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya.

Adapun masalah lebih spesifik dari studi ini adalah:

- a. Mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan lokal dalam menjalankan fungsi intermediasi khususnya dan fungsi pendorong ekonomi pada umumnya.
- b. Bagaimanakah kinerja ekonomi lembaga keuangan lokal dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendorong perekonomian anak nagari.
- c. Faktor apakah yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan lokal dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam studi ini, tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk melihat dan mengetahui secara jelas apa dan bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan lokal dalam mendorong perekonomian masyarakat di wilayah Sumatera Barat.

Adapun tujuan penelitian yang lebih spesifik dari studi ini adalah:

- a. Untuk dapat mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan lokal dalam menjalankan fungsi intermediasi khususnya dan fungsi pendorong ekonomi pada umumnya.
- b. Untuk mempelajari kinerja ekonomi lembaga keuangan lokal dalam menjalankan fungsi intermediasi khususnya dan mendorong perekonomian masyarakat di daerah pada umumnya.
- c. Untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi peran lembaga keuangan lokal dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah.
- d. Untuk dapat merumuskan rekomendasi akademis dari hasil kajian ini yang berguna bagi pengembangan lembaga keuangan di daerah, khususnya di tingkat nagari, yang cocok dengan karakteristik kegiatan ekonomin masyarakat setempat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak;

- a. Bagi Peneliti.
 - i. Untuk dapat lebih mengaplikasikan teori dasar yang dimiliki ke dalam realita yang ada dalam kehidupan nyata.
 - ii. Untuk dapat mempelajari dan melihat dengan lebih dekat dan seksama dinamika usaha lembaga keuangan lokal di daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi perannya dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah.
 - iii. Untuk dapat mendorong dan membantu proses penulisan skripsi mahasiswa yang merupakan salah satu syarat dan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program sarjana di jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Bagi Masyarakat
 - i. Dapat lebih mengetahui bagaimana kinerja lembaga keuangan dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah

- ii. Dapat lebih mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan lokal dalam mendorong perekonomian masyarakat.
- c. Bagi Pengambil Kebijakan/Pemerintah
 - i. Mendapatkan gambaran tentang peran yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan lokal dalam maendorong perekonomian masyarakat di daerah.
 - ii. Dapat merumuskan dan menentukan langkah kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong peran lembaga keuangan lokal di daerah, dalam upaya meningkatkan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di daerah khususnya dan perekonomian Sumatera Barat pada umumnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada nagari yang ada di daerah kabupaten dalam wilayah Sumatera Barat, dan untuk mencapai tujuan studi ini maka aspek utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- i. Gambaran umum dan potensi serta karakteristik perekonomian Sumatera Barat, yang meliputi potensi dan karakteristik geografis, demografis dan ekonomi .
- ii. Gambaran umum perkembangan lembaga keuangan lokal di nagari yang antara lain meliputi, kemampuan menjalankan fungsi intermediasi keuangan, jumlah serta perkembangan aset dan nasabah dan kemampuan meningkatkan daya saing.
- iii. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan lokal dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendorong perekonomian masyarakat di daerah .
- iv. Membuat perumusan strategi dan langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong peranan lembaga keuangan lokal dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat daerah di wilayah Sumatera Barat.

1.6. Daerah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Sumatera Barat dengan memilih sampel daerah yang akan mewakili karakteristik ekonomi, geografis dan demografis anak nagari di Minangkabau. Dari segi geografis daerah terpilih akan mewakili daerah pesisir dan daerah pedalaman di Sumatera Barat. Sedangkan dari segi ekonomi, akan dilihat dari kriteria daerah dengan kondisi ekonomi baik dan daerah dengan kondisi ekonomi kurang baik.

Untuk itu dalam studi ini dipilih 2 (dua) kabupaten dalam wilayah Sumatera Barat yang mewakili daerah Luhak nan Tigo dan daerah rantau di Minangkabau, sekaligus mewakili karakteristik ekonomi dan geografis serta demografis. Adapun daerah yang dipilih untuk mewakili nagari di Luhak nan tigo adalah Kabupaten Agam, dan juga merupakan daerah pedalaman. Sedangkan daerah rantau diwakili oleh kabupaten Pesisir Selatan yang juga merupakan daerah pesisir.

Selanjutnya dari setiap kabupaten sampel akan dipilih secara *purposive random sampling* sebanyak 2 nagari, dengan memperhatikan karakter ekonomi, sosial dan budaya, serta geografis dan demografis untuk dapat mewakili karakteristik ekonomi dan sosial penduduk atau masyarakat daerah di wilayah Sumatera Barat.

1.7. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden terpilih dengan menggunakan instrumen penelitian daftar pertanyaan terstruktur. Sedangkan data sekunder yang merupakan data pendukung diperoleh dari lembaga keuangan lokal di daerah dan berbagai literatur, serta publikasi dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

1.8. Metode Analisa

Metode analisa data yang digunakan dalam studi ini adalah gabungan dari analisa deskriptif kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa deskriptif digunakan

untuk menjelaskan kondisi dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang diwakili oleh rumah tangga terpilih. Adapun alat analisa yang digunakan adalah tabel frekwensi dan tabulasi silang.

Sedangkan analisa kuantitatif dilakukan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dari sumberdaya yang dimiliki nagari baik sumberdaya manusia, keuangan dan ekonomi dalam mengembangkan lembaga keuangan lokal di nagari sesuai karakteristik kegiatan ekonomi. Untuk dapat melihat hubungan antar variabel yang diamati akan dilakukan dengan pendekatan ekonometris.

1.9. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini secara menyeluruh diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan atau 24 minggu, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu (minggu)
1	Persiapan dan penyusunan proposal	3.0
2	Persiapan dan penyusunan daftar pertanyaan	3.0
3	Uji coba daftar pertanyaan	2.0
4	Pengumpulan data	4.0
5	Pengolahan dan analisa data	4.0
6	Penulisan draft laporan	6.0
7	Perbaikan laporan dan penyerahan laporan	2.0
Total waktu		24.0

1.10. Tim Peneliti

Penelitian ini akan dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari staf pengajar di jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dengan susunan organisasi penelitian sebagai berikut:

Ketua tim : Dra. Anurlis Abbas, Ma
 Anggota : Drs. M. Nazer, MA.
 Drs. Amra Ausri
 Sri Maryati, SE, MSi
 4 orang mahasiswa.

Adapun judul skripsi mahasiswa yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

Tabel 1.3. Nama Mahasiswa dan Judul Skripsi

No BP	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
90151006	Sri Novita	Lembaga Keuangan Lokal dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Pesisir Selatan
90151050	Meiniswita Ramsa	Analisis Faktor Penentu Peran Lembaga Keuangan Lokal di Sumatera Barat: Pendekatan Penghimpunan Dana.
90151074	Dewi Harmaini	Analisis Faktor Penentu Peran Lembaga Keuangan Lokal di Sumatera Barat: Pendekatan Penyaluran Dana.
90151092	Sismawati	Lembaga Keuangan Lokal dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Agam

1.11. Biaya Penelitian.

Penelitian ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) , dengan rincian biaya sebagai berikut:

Tabel 1.4.. Rincian Dana Penelitian.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya/Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
I	Biaya Persiapan			
1	Pembuatan Proposal	paket	150.000,-	150.000,-
2	ATK Habis Pakai	paket	150.000,-	150.000,-
II	Data & Pengolahan			
1	Pengumpulan data	paket	1.500.000,-	3.000.000,-
2	Pengolahan dan analisa	paket	1.000.000,-	1.000.000,-
III	Honor Peneliti			
1	Ketua (1 orang)	6 bulan	200.000,-	1.200.000,-
2	Wakil Ketua (1 orang)	6 bulan	150.000,-	900.000,-
3	Anggota (6 orang)	6 bulan	100.000,-	3.600.000,-
Total Biaya Penelitian				10.000.000,-
Sepuluh Juta Rupiah				

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa serta temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan lokal dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya
- b. Untuk mengembangkan lembaga keuangan lokal, perlu diperhatikan potensi ekonomi dan sosial serta karakteristik geografis dan demografis.
- c. Kelompok masyarakat yang berpotensi besar untuk dijadikan target sebagai nasabah BPR adalah pedagang (45%), PNS/BUMN (20%), petani (13,3%) dan lainnya (21,7%). Sedangkan untuk anggota koperasi simpan pinjam juga diarahkan untuk mereka yang berprofesi sebagai pedagang (60%), petani (15%), PNS/BUMN (10%), pensiunan (5%) dan lainnya (10%).
- d. Hasil estimasi terhadap model penelitian memperlihatkan bahwa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan lembaga keuangan lokal sebagai tempat penyimpanan dana adalah tingkat bunga, keterampilan petugas, dan adanya fasilitas antar jemput dengan derajat kepercayaan 95%. Sedangkan faktor penentu untuk meminjam pada lembaga keuangan lokal adalah variabel tingkat bunga dan fasilitas antar jemput, dengan derajat kepercayaan 90%.
- e. Secara umum persepsi dan penilaian nasabah terhadap aspek kualitas pelayanan dari lembaga keuangan lokal, yaitu BPR dan Koperasi Simpan Pinjam adalah baik dan positif. Ini diperlihatkan banyaknya masyarakat yang menyatakan puas dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan serta aktivitas masyarakat dalam menabung dan mendepositokan dananya maupun dalam hal peminjaman dana pada lembaga keuangan lokal.

- f. Adapun persepsi institusi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Lokal, dalam hal ini tokoh adat, alim ulama maupun wali nagari memiliki penilaian yang baik terhadap kinerja dari Lembaga Keuangan Lokal. Namun khusus dari alim ulama berharap agar Lembaga Keuangan Lokal, khususnya BPR dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.

6.2. Saran

- a. Aspek pelayanan terutama keterampilan petugas dan fasilitas antar jemput haruslah lebih diperhatikan oleh lembaga keuangan lokal terutama dalam meningkatkan jumlah dan kualitas nasabah dari lembaga keuangan yang bersangkutan.
- b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat bunga yang ditawarkan lembaga keuangan lokal (BPR dan Koperasi Simpan Pinjam) haruslah mampu bersaing dengan tingkat bunga yang ditawarkan lembaga keuangan lainnya di daerah.
- c. Perlu dilakukan pengembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik bagi staf/karyawan lembaga keuangan lokal yang bersangkutan melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- d. Diperlukan kerjasama antar lembaga keuangan dengan pemerintah maupun masyarakat, sehingga lembaga keuangan mampu meningkatkan kinerja usahanya dan semakin meningkatkan perannya dalam perekonomian.
- e. Diperlukan adanya pengawasan yang konsisten dan kontiniu terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan lokal, khususnya yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang profesional dan berpengalaman.

6.3. Keterbatasan Studi

Ilmu ekonomi ekonomi adalah ilmu sosial, dimana variabelnya sangat banyak dan senantiasa berubah, sejalan dengan dinamika kehidupan dan aktivitas ekonomi manusia. Studi ini merupakan kajian yang mengamati variabel ekonomi dan sosial dalam melihat peran lembaga keuangan lokal sebagai salah

satu institusi ekonomi yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu studi ini memiliki banyak keterbatasan yang perlu dipahami, terutama oleh para peneliti yang tertarik dengan studi ini dan ingin mengembangkan atau melanjutkan studi ini serta para pengamat ekonomi dan para paengambil kebijakan.

Adapun keterbatasan studi ini diantaranya adalah:

- a. Cakupan daerah penelitian, dimana hanya meneliti 4 (empat) nagari di 2 (dua) kabupaten, meskipun mempertimbangkan kondisi dan karakteristik ekonomi, sosial, geografis dan demografis. Tetapi mengingat luas wilayah Sumatera Barat dengan karakteristik yang berbeda akan lebih baik bila penelitian ini dilakukan dengan memilih daerah penelitian yang lebih banyak dan beragam sesuai karakteristik ekonomi, sosial dan budaya serta geografis dan demigrafis.
- b. Jumlah sampel responden penelitian ini adalah 160, merupakan jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah nasabah lembaga keuangan lokal, apalagi dengan jumlah penduduk Sumatera Barat. Untuk itu penelitian lanjutan perlu meningkatkan jumlah sampel agar hasil yang didapat benar-benar mampu mewakili dan menggambarkan karakteristik populasi yang diamati.
- c. Peran lembaga keuangan lokal dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dalam studi ini, dilihat dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana pada nasabah/anggota lembaga keuangan yang bersangkutan. Sehingga tidak dapat dilihat bagaimana peran lembaga keuangan ini dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang bukan nasabah/anggota dan bagaimana pendapat mereka tentang peran lembaga keuangan di daerah yang bersangkutan.
- d. Studi ini belum mampu menggali secara optimal variabel ekonomi dan sosial yang mempengaruhi peran lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dari nilai R^2 yang relatif kecil. Karena dengan metode backward, semua variabel yang pengaruhnya tidak signifikan secara bertahap akan dikeluarkan. Untuk itu bagi peneliti lain agar memilih variabel yang lebih tepat dan lebih akurat dalam pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. S, *Koperasi, Teori dan Prakteknya*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Arnely. Desi, *Peranan Industri Perbankan Dalam Pembiayaan Pembangunan Sumatera Barat (1986-1996)*, FE-UNAND, Padang, 1999
- Bachtiar. Nurzaman, *Industrialisasi Dalam Pembangunan Daerah Sumatera Barat*, Dalam Jurnal Ekonomi dan Majemen, vol III, No. , FE-UNAND, Padang, 1991
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia*, 2003
- Biro Riset Infobank (Hirl), Infobank no. 287, April 2003.
- BPS, *Pesisir Dalam Angka*, Painan, 2001
- ___, *Agam Dalam Angka*, Lubuk Basung, 2002
- ___, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Padang, 2002
- Gujarati. Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Hamid, Edi Suandi, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milienium III*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, LPFE-UI, Jakarta, 1999, hal 164
- Imelia, *Peranan Lembaga Keuangan Formal dan Informal dalam Aspek Permodalan Usaha Kecil di Kecamatan Lintau Buo I Propinsi Sumatera Barat*, Thesis, Program Pascasarjana Unand, Padang, 2003.
- Irwan. Oktavianty. Sherly, *Perkembangan Perbankan Dan Mobilisasi Tabungan Masyarakat Di Indonesia (1985-1997)*, FE-UNAND, Padang, 2000
- Juoro, Umar, *Bunga Pinjaman dan BPR*, situs Internet Center for Information and Development Studies, 2003.
- Kartasaputra, Drs, SH, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal 74-82

- Lains. Alfian, *Kebudayaan Dan Ekonomi Khusus Lembaga Keuangan Pedesaan Di Sumatera Barat*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol III, No. 2, 1991, hal 19-37
- Mubariq, *Kegiatan Perbankan Di Daerah Dalam Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, FE-UI, Jakarta, 1987
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1992
- Siamat. Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPFE-UI, Jakarta, 2000
- Sjafrizal, *Pola Pembangunan Daerah Pedesaan Sumatera Barat, Pengalaman dan Gagasan*, Dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.1, No. 2, 1988, hal 15-33
- _____, *Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pembangunan Daerah*, Dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.4, No. 1, 1992, hal 1-22
- Soetatwo dan Faried Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, LPFE-UGM, Yogyakarta, 1980
- Sukirno. Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Tim Peneliti UNAND, *Penelitian Dasar (Base Line Survey) BPR di Wilayah Sumatera Barat*, Padang, 2002
- Usman. Hardius, *Penggunaan Teknik Ekonometrik Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknis Analisis dan Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*, Rajawali Pers, 2002
- Yafrizal, *Pemanfaatan Lembaga Perbankan Dalam Pengembangan Usaha Pedagang Kecil*, Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, Vol I, No I, 1999.
- Yulia. Rika, *Perbandingan Jumlah Bank Yang Ideal di Kotamadya Padang dan di Kabupaten Pasaman*, FE-UNAND, Padang, 2000
- Zulhaqi, *Persepsi dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Sumatera Barat Dalam Menabung*, FE-UNAND, Padang, 2000